

## Buku

# Kelas Menengah, Kelas Apa ?

Nicos Poulantzas, *Classes in Contemporary Capitalism* (London: Verso Edition, Second Impression, 1979), 343 halaman.

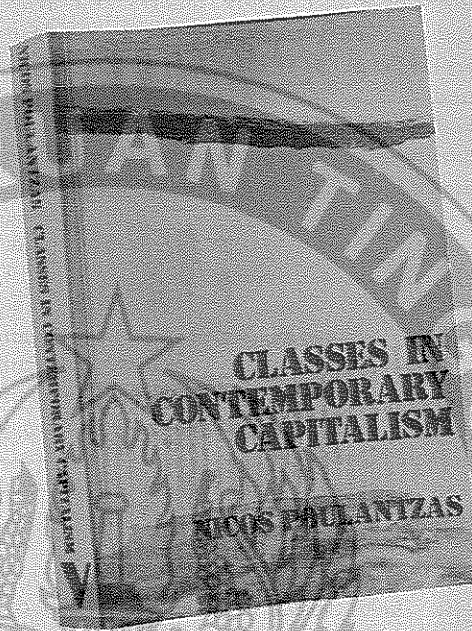
Poulantzas adalah salah seorang dari sejumlah pemikir Perancis. Dia dikenal lewat buku-bukunya yang cukup menarik. Bukunya yang pertama, *Political Power and Social Classes* dan yang kedua, *Fascism and Dictatorship*, merupakan dasar pengembangan dari pemikiran dan juga kerangka teori yang diuraikan dalam bukunya yang ketiga, yang berjudul *Classes in Contemporary Capitalism* ini. Buku ini mencoba menjelajahi aspek-aspek struktur kelas dalam masyarakat kapitalis maju dewasa ini. Secara tajam ia membuat perbedaan antara *agents* dan posisi dari hubungan produksi kapitalis, dan berusaha untuk mencegah kekeliruan yang tipikal dari fungsionalis dan historisisme.

Buku ini merupakan serangkaian analisa yang membahas tentang kelas sosial serta aparat negara dalam fase kapitalisme monopoli, khususnya yang ada di Eropa. Pada bagian pertama buku ini, ia mencoba untuk membahas dan mengenali ciri-ciri umum situasi dewasa ini dan pengaruhnya terhadap formasi sosial. Pada bagian kedua, Poulantzas mencoba memberikan analisa secara lebih tepat mengenai apa yang disebut dengan burjuasi, dan pada bagian ketiga dari buku ini ia menguraikan analisisnya tentang apa yang disebutnya dengan *petty bourgeoisie* dalam pengertian lama dan baru, yang dikenal dengan "lapisan menengah baru" terutama dalam kaitannya dengan perkembangan kapitalisme yang sedang berlangsung dewasa ini.

## Kelas Sosial

Dalam uraian pendahuluan, Poulantzas

menjelaskan bahwa dengan mengaitkan antara analisa teoritis dengan analisa kongkrit, dia mendasari uraian-uraian berikutnya. Kemudian, ia mulai menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kelas sosial. Menurutnya, kelas sosial tidak hanya dapat dilihat dari aspek ekonomi dan proses produksi ataupun formasi sosial, tetapi termasuk juga aspek politik dan ideologi yang dikenal sebagai suprastruktur. Kelas sosial selalu terkait dengan kontradiksi dan perjuangan kelas. Kelas yang dimaksud di sini berbeda dengan apa yang dikenal oleh Hegelian dengan skema *class-in-itself* (situasi kelas ekonomi yang semata-mata ditentukan oleh proses produksi) dan *class-for-itself* (kelas yang dengan sendirinya "sadar kelas" dan merupakan organisasi politik yang otonom). Implikasinya, setiap kelas dalam suatu proses produksi umumnya ditandai dengan adanya pengaruh dari determinasi struktural terhadap kelas tersebut, termasuk adanya



hubungan politis dan ideologis dari pembagian kerja. Lebih lanjut, "kesadaran kelas" dan organisasi politik yang otonom, sepanjang yang dikenal oleh kelas pekerja, adalah suatu ideologi yang mengacu pada posisi kelas dan menandakan adanya tradisi yang memungkinkan terjadinya intervensi kelas sebagai kekuatan sosial.

Prinsip utama untuk menganalisa kelas sosial adalah dengan melihat keberadaan mereka dalam perjuangan kelas, yang harus dibedakan dari asal-usul mereka. Jadi, kelas sosial mengacu pada keberadaan mereka dalam tempat kerja, yang biasanya ditandai dengan peranan mereka dalam hubungan ekonomi. Yang dimaksud dengan "ruang ekonomi" atau *economic space*, ditentukan oleh proses produksi, sedangkan posisi atau tempat pekerja ditentukan oleh hubungan produksi. Proses produksi berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan alam pada umumnya, sedangkan hubungan produksi dalam masyarakat yang mengenal pembagian kelas menunjuk pada dua hal, yakni *pertama*, hubungan antara pekerja dengan obyek dan alat kerjanya; dan *kedua*, hubungan antara sesama manusia yang dikenal dengan hubungan kelas.

Jika kelas sosial hanya semata-mata dilihat dari pola produksi, maka akan terdapat dua kelas yang ditentukan oleh aspek politik, ekonomi dan ideologi, yakni kelas peme-  
ras yang secara politis dan ideologis dominan, dan kelas yang diperas, di mana yang disebut kedua juga secara politis dan ideologis didominasi oleh yang pertama: tuan dan hamba dalam pola produksi perhambaan, bangsawan dan pelayan dalam pola produksi feodal, borjuis dan pekerja dalam pola produksi kapitalis. Namun begitu, dalam realitas sosial, formasi sosial yang terjadi tidak hanya terdiri dari suatu hubungan kelas yang tunggal, melainkan merupakan campuran dari beberapa hubungan sosial yang dibentuk oleh pola dan bentuk produksi, sehingga dalam membuat analisa kelas, tidak dapat dilakukan pembagian kelas secara simplistis.

## Aparat Negara dan Transformasi Radikal

Dalam uraian berikutnya, dicoba untuk

dibahas tentang aparat negara dan hubungannya dengan kelas sosial, dalam artian bahwa terdapat suatu tanda adanya peran yang dimainkan oleh aparat negara dalam eksistensi dan perkembangan kelas sosial. Disebutkan bahwa peranan utama aparat negara adalah untuk memelihara dan menjaga kesatuan dan ikatan sosial, dengan cara memusatkan dan memberi sanksi yang menunjukkan adanya dominasi kelas. Dengan jalan tersebut tercipta hubungan kelas. Hubungan politis dan ideologis "dimatangkan" atau diwujudkan sebagai benda oleh aparat negara.

Menurut Poulantzas, aparat negara antara lain terdiri atas, aparat negara represif (tentara, polisi, penjara, badan peradilan, pegawai negeri), aparat negara ideologis (pendidikan, keagamaan, aparat informasi—radio, televisi, surat kabar), aparat kultural—bioskop, teater, penerbitan—aparat serikat pekerja yang berkolaborasi dengan partai burjuis serta dalam situasi tertentu. Namun perlu diingat bahwa aparat negara tidak memiliki kekuasaan sendiri. Mereka hanya mewujudkan dan memusatkan hubungan kelas. Sementara itu, negara, tidak merupakan suatu entitas tersendiri yang secara intrinsik hakekatnya bersifat instrumental, tetapi lebih merupakan suatu pemantapan hubungan kelas. Ini akan mempunyai implikasi bahwa berbagai macam fungsi aparat negara—politik, ekonomis, ideologis—ketika memenuhi perannya dalam hubungan sosial tidak bersifat netral, dan dominasi politiknya sendiri dibatasi keberadaan dan fungsinya sebagai aparat negara. Berarti, transformasi radikal dari hubungan sosial tidak hanya terbatas pada perubahan di dalam kekuasaan negara, tetapi harus juga mengubah aparat negara itu sendiri dari satu kelas ke kelas yang lain. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa dalam menganalisa suatu formasi sosial, perlu dipertimbangkan secara cermat hubungan dari perjuangan kelas, hubungan kekuasaan, dan aparat negara yang mewujudkan, memusatkan dan merefleksikan hubungan tersebut. Di sini aparat negara, khususnya aparat ideologis memiliki peran yang menentukan dalam perkembangan kelas sosial. Sebagai contoh, sekolah, yang meskipun tidak menciptakan pembagian kelas tersendiri, tetapi ia memiliki atau

memberi sumbangan atas perkembangan kelas sosial.

## Peta Situasi Dunia

Dalam pembahasan berikutnya, Poulantzas mencoba mengenali situasi dewasa ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan pokok: bagaimana sebenarnya hubungan baru yang terjadi di negara-negara yang memiliki formasi sosial imperialis, dan apa pengaruhnya terhadap aparat negara? Apakah masih mungkin berbicara tentang *national state* dalam suatu metropolitan imperialis? Apa kaitan antara negara dengan proses internasionalisasi modal atau perusahaan multinasional? Adakah suatu bentuk lembaga *super-state* baru yang menggantikan *national state*, atau adakah modifikasi dari negara dalam upaya pemenuhan fungsinya yang baru karena perluasan akumulasi modal dalam tingkat internasional? Dalam hubungan ini, ia mengemukakan adanya dua kecenderungan. *Pertama*, dari kalangan penulis seperti Paul Sweezy, Harry Magdoff, Martin Nicolaus, Pierre Jalee, dan sebagainya yang dikenal dengan versi sayap kiri dari teori *ultraimperialism* Kautsky, yang menyatakan bahwa terdapat peranan yang dominan dari Amerika Serikat di antara negara-negara kapitalis, di mana hubungan di antara mereka ditandai oleh pasifikasi dan integrasi di bawah dominasi modal Amerika yang tidak tertandingi. *Kedua*, meskipun dengan argumentasi yang beragam, tetapi masih dalam suatu basis yang sama, yaitu penulis-penulis seperti Ernest Mandel, Michael Kidron, Bill Warren, Bob Rowthron dan J. Valier, yang mengemukakan bahwa dalam fase imperialisme dewasa ini, kelihatannya hubungan kerjasama antara negara-negara imperialis tidak mengalami perubahan struktural. Terlepas dari perbedaan kecenderungan ini, ia menyimpulkan bahwa hegemoni Amerika cenderung merosot semenjak Eropa membangun dirinya dari puing-puing Perang Dunia II. Dengan kata lain, kemerosotan ini harus dipahami dalam konteks keseluruhan tahapan hegemoni Amerika. Ini menunjukkan adanya krisis di seluruh negara imperialis, yang ditandai dengan semakin tajamnya kontradiksi di antara mereka. Dengan begitu burjuasi di negara-negara imperialis

hanya bisa dianalisa dalam konteks internasionalisasi hubungan kapitalis yang menandai fase imperialisme dewasa ini.

## Kontradiksi

Pembahasan mengenai burjuasi dimulai dengan apa yang disebut dengan kontradiksi dan hubungannya dengan *state*. Dalam masa transisi menuju kapitalisme, terdapat ketidakseimbangan pola dan bentuk produksi feodal dengan pola produksi kapitalis. Hubungan produksi pun masih bersifat manufaktur, di mana pemilik sekaligus menjadi produsen. Kemudian dengan meluasnya kapitalisme, maka terbentuk apa yang disebut kapitalisme kompetitif, yang berlanjut dengan kapitalisme monopoli.

Tahapan kapitalisme monopoli ini mengalami tiga fase, yakni; fase transisi dari kapitalisme kompetitif ke kapitalisme monopoli, fase konsolidasi kapitalisme monopoli dan fase kapitalisme monopoli dewasa ini. Dalam tahapan kapitalisme monopoli ini, pola produksi kapitalis makin mantap dan dominan, namun pada fase awalnya masih terdapat perlindungan bagi pola produksi lain, terutama komoditi yang dihasilkan dengan pola produksi dalam industri kecil. Pada fase berikutnya, terjadi ketidakseimbangan antara kapitalisme kompetitif dengan kapitalisme monopoli, yang pada gilirannya kapitalisme monopoli menjadi dominan dan mantap. Pada saat itulah terjadi pemusatan modal, dan proses produksi berlangsung sangat eksploitatif. Ketika terjadi monopoli modal, maka terdapat modifikasi hubungan produksi. Monopoli modal tersebut mengandung kontradiksi atas dirinya. Kontradiksi ini juga berlangsung antara modal monopoli dan nonmonopoli. Kontradiksi berikutnya terjadi antara modal nonmonopoli dengan burjuasi tradisional, termasuk kontradiksi dalam modal nonmonopoli sendiri.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, di mana posisi golongan manajer dan pimpinan aparat negara? Mereka termasuk dalam determinasi struktural atau anggota kelas apa? Apakah mereka termasuk atau tidak termasuk dalam kelas kapitalis? Pertanyaan ini menarik. Jawabannya dua macam. *Pertama*, mereka adalah identik dengan pemilikan ekonomi, jadi termasuk dalam kelas kapita-

lis, karena mereka mendorong hubungan pemilikan ekonomi. *Kedua*, mereka terpaksa berada dalam suatu sistem yang harus setia kepada logika keuntungan. Namun begitu, kedua jawaban ini dianggap tidak memuaskan, sebab pemilikan ekonomi harus dibedakan dengan pengambilan keputusan. Juga, jawaban kedua menafikan kenyataan bahwa kriteria keanggotaan dalam suatu kelas tidak merupakan motivasi perilaku, tetapi merupakan suatu kategori obyektif yang merujuk pada suatu bentuk di mana nilai lebih dapat dicapai dan diwujudkan. Dari sinilah kemudian Poulantzas mengembangkan teorinya mengenai *petty bourgeoisie* dalam pengertian lama dan baru.

### Dilema Kelas Menengah

*Petty bourgeoisie* atau burjuasikecil merupakan masalah pelik dalam kerangka teori kelas sosial. Sebelum diuraikan lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat tiga versi tentang burjuasi kecil baru ini. *Pertama*, yang menyatakan bahwa kelompok "bergaji" ini dapat dimasukkan dalam kelas borjuis atau telah mengalami borjuisasi. *Kedua*, mereka dapat dimasukkan dalam kelas pekerja atau disebut juga kelas "bergaji". *Ketiga*, khususnya diwakili oleh Dahrendorf, mencoba memisahkan mereka yang termasuk dalam kelas borjuis dan ada pula yang termasuk dalam kelas pekerja. Kecenderungan lain, meskipun terdapat beberapa varian, dikenal dengan apa yang dinamakan kelas menengah. Karena posisinya yang unik, mereka ini dapat disebut sebagai penyangga, mediator, yakni yang menjembatani kelas borjuis dengan kelas pekerja, sekaligus berfungsi sebagai faktor stabilisator masyarakat borjuis. Kelas menengah di sini dilihat sebagai "kelompok yang homogen", yang pada umumnya didefinisikan atas dasar kriteria pendapatan, sikap mental dan motivasi psikologis.

Borjuis kecil dalam artian lama adalah pedagang, pengusaha industri kecil, tukang yang bebas, dan sebagainya. Masalah teoritis yang muncul adalah: di mana posisi borjuis kecil tersebut dalam determinasi kelas struktural? Apakah mereka memiliki ciri yang menonjol sebagaimana kelas borjuis dan kelas pekerja? Bagaimana posisi politis dan

ideologi borjuis kecil? Dapatkah borjuis kecil memiliki otonomi posisi kelas tersendiri dalam jangka panjang? Borjuis kecil dalam artian lama tidak termasuk dalam pola produksi kapitalis, tetapi lebih merupakan bentuk transisi dari pola produksi feodal ke pola kapitalis? Borjuis kecil baru agak cenderung anti kapitalis, tetapi lebih kepada ilusi reformis. Biasanya mereka lebih berkepentingan dalam soal "partisipasi", yang karena kekhawatiran akan terjadi proletarisasi, cenderung menginginkan "karir", "promosi", "mobilitas vertikal" dan sebagainya. Juga, mereka cenderung untuk "menuhankan kekuasaan." Borjuis kecil dalam artian lama secara ideologis, biasanya anti kapitalis, walau dalam posisi *status-quo*. Mereka takut jika terjadi transformasi sosial secara mendasar. Mereka juga takut terjadi proletarisasi. Karena itu tuntutan mereka adalah "kesempatan yang sama", "persaingan sehat", "jangan monopoli" dan sebagainya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa borjuis kecil dalam artian lama maupun baru yang dikenal dengan "kelas menengah" tidak memiliki otonomi posisi kelas politis maupun ideologis dalam jangka panjang. Ini berarti bahwa mereka bisa berperan untuk dan atas nama kelas borjuis maupun kelas pekerja. Namun masalahnya cukup kompleks, karena dewasa ini kelihatannya mereka masih berperan sebagai penengah dalam peristiwa politik tertentu, yang dalam kunjungtur jangka pendek, masih merupakan kekuatan sosial yang nyata.

Usaha Poulantzas untuk menjelaskan situasi dan posisi kelas menengah baru yang disebutnya dengan *new petty bourgeoisie* sesungguhnya cukup menarik jika dihubungkan dengan kesulitan di mana kelas ini harus ditempatkan dalam pola hubungan produksi kapitalis. Meskipun apa yang dikemukakan ini terkesan "Eropa" sentris, namun banyak pelajaran dapat ditarik dari sini, terutama apabila diamati proses perkembangan industrialisasi yang pada saat ini sebagai fenomena umum di negara-negara berkembang.

HADIMULYO \*

\* Penulis adalah alumnus IAIN Jakarta. Sekarang sebagai Pimpinan Program Pesantren, LP3ES.

# Memahami "Ideologi" Baru Teknologi

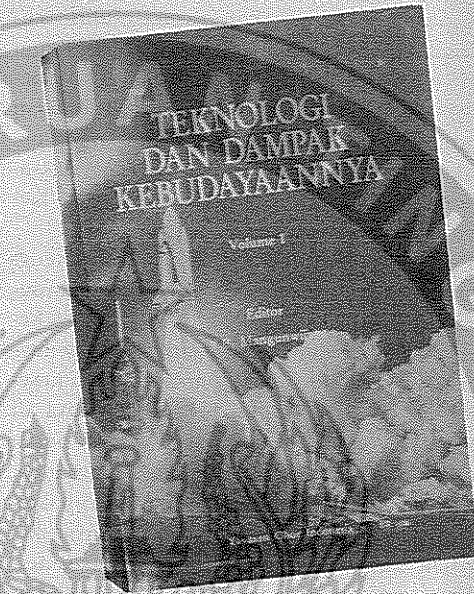
Y.B. Mangunwijaya (Ed.), *Teknologi dan Dampak Kebudayaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1983), 128 halaman.

Teknologi maju dewasa ini benar-benar telah menjalar ke seluruh penjuru mata angin, jauh menerobos batas geografis di tempat kelahirannya. Kalau kita masih bersedia memandangnya dalam artian yang klasik, sesungguhnya ia mulanya tak lebih dari salah satu unsur di antara sekian unsur yang mengisi pengertian kebudayaan. Namun kini teknologi secara efektif telah beralih menjadi semacam tongkat komando yang dapat memberikan arah, menetapkan larangan, dan bahkan memaksakan instruksi-instruksi kepada unsur-unsur kebudayaan lainnya, seperti misalnya: sistem mata pencaharian, sistem organisasi sosial dan pula, ilmu pengetahuan selaku biang langsungnya.

Teknologi bukan lagi semata-mata merupakan penerusan lebih lanjut dari peralatan—yang secara demikian terdapat di seluruh taraf kebudayaan—melainkan telah bergerak meloncat ke tangga yang cukup tinggi dalam kapasitas implikatif, berupa kecenderungan untuk mendisposisi kompleks tata pikir, tata kelakuan dan sikap mental hidup kemasyarakatan.

Pendek kata dapat disimpulkan betapa hubungan timbal balik antara teknologi di satu pihak dengan kebudayaan di lain pihak bergeser ke arah kondisi, di mana *bargaining position* di pihak kebudayaan menjadi makin merosot.

Malahan, filsafat kebudayaan tampaknya kurang berperan dan apalagi berwenang membimbing perkembangan teknologi, sejalan dengan merosotnya otoritas otentik filsafat kebudayaan itu sendiri. Sedemikian rupa "impotensi" canang kefilosofatan sehingga yang terjadi justru sebaliknya, bahwa teknologilah kini memaksakan sistem



nilai tertentu ke arah makin terbukanya jalan lapang petualangannya yang gawat.

Kebudayaan Barat yang melahirkannya pun, diakui atau tidak, telah terjebak ke dalam anyaman tata nilai yang agak kusut, maka sampai dewasa ini perdebatan tentang teknologi maju—atau peluang atau masalah—masih terus saja berlangsung.

Erat hubungannya dengan kompleksitas masyarakat yang konon menjadi bahan bakar yang baik bagi mencuatnya teknologi, ataupun juga kompleksitas teknologi itu sendiri, bunga rampai yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia ini mengajak pembaca untuk merefleksikan sampai kepada jiwa, ideologi, dan filsafat apakah yang gerangan terkandung dalam benda-benda teknologi beserta proses mental sosial yang mengikutinya.

Disunting oleh Y.B. Mangunwijaya, buku ini merangkum 13 artikel yang ditulis oleh sederet ahli yang memang tampak kompe-

ten, 3 di antaranya dari Indonesia, yakni Filino Harahap, Soemitro Djojohadikusumo, dan Soedjatmoko. Pembaca dapat menikmati misalnya tulisan J.K. Galbraith, A.J. Toynbee dan Marshall McLuhan, untuk menyebut sedikit nama partisipan dengan gagasannya yang tangguh, yang umumnya diterjemahkan dari artikel aslinya dalam bahasa asing.

Dalam Bab I, II, dan VI, cendekiawan Indonesia membicarakan urgensi alih teknologi dan penetapan jenisnya yang sesuai bagi masyarakat Indonesia. Terutama Soedjatmoko menyorot perspektif kebudayaan dalam rangkaian upaya itu, dengan menekankan upaya membangkitkan kekuatan tradisional dalam sistem nilai negeri Dunia Ketiga.<sup>1</sup>

Prof. Soemitro Djojohadikusumo mengingatkan bahwa ilmu dan teknologi mempunyai dampak besar dan luas di bidang kemasyarakatan, namun menjadi tugas semua pihak untuk mengembalikannya pada kesejahteraan umat manusia. Di negeri kita di antaranya diperlukan peningkatan peran para ilmuwan bagi pembangunan bangsanya. Penelitian, ilmu, dan teknologi merupakan mata rantai dalam suatu siklus, untuk keperluan mana di bagian hulunya harus tersedia suatu sistem pendidikan yang mampu memperkembangkan siklus yang dimaksud. Sedangkan di pihak lain, di bagian muaranya perlu disediakan mata rantai lanjutan berupa sistem komunikasi, kegiatan informasi, inovasi, dan *entrepreneurship*. Tiga jenis teknologi yang bagi Indonesia penting untuk dikembangkan adalah teknologi adaptif, teknologi protektif, dan teknologi maju.

Filino Harahap menekankan bahwa masyarakat bangsa kita harus bersengaja memindahkan teknologi (*transfer of technology*) dari negeri maju, dan tak sekedar menunggu kehadirannya lewat penyebaran teknologi (*diffusion of technology*) yang lambat laun memang akan terjadi. Dengan alih teknologi yang bisa berlangsung melalui berbagai jalan, badan internasional, perusahaan, universitas, dan perorangan, tentu diperlukan suatu perencanaan cermat menyangkut kondisi, strategi, persyaratan dan faktor-

faktor lainnya yang perlu. Sebaliknya dari memberikan analisa tentang banyak hal yang disebutkan itu, Filino Harahap lebih suka menyebutkan setumpuk persoalan yang menurut hematnya harus diberi jawaban terlebih dahulu sebelum alih teknologi tersebut dilaksanakan.

Soedjatmoko, sebagaimana layaknya seorang pemikir kebudayaan, melihat alih teknologi dalam kerangka masalah yang lebih luas dan mendalam, khususnya menyangkut segi-segi historis kultural masyarakat setempat. Komitmennya terhadap kebudayaan tradisional cukup eksplisit, seperti dinyatakan sebagai berikut:

Pada tingkat kebudayaan, negara-negara kurang berkembang mungkin dapat menemukan kunci dari semangat, motivasi, dan penampilan diri yang diperlukan guna menyusun pola-pola pembangunan yang baru dan berbeda. Kreatifitas dan kepercayaan kepada diri sendiri bagaimanapun juga tertanam dalam suatu rasa identitas nasional serta kultural, dan dalam kebanggaan serta harga diri yang melekat padanya. Sumber-sumber kegiatan sosial dari kebanyakan masyarakat terdapat dalam acuan religio-kultural mereka. (halaman 54).

Untuk menguatkan "nasehat" Soedjatmoko, Surendra J. Patel menulis dalam Bab V mengenai resiko apa sajakah yang akan diderita Dunia Ketiga dari ketergantungan teknologi Barat. Resiko yang dimaksud adalah biaya-biaya baik yang dapat ditaksir secara langsung maupun yang tak pernah dapat diperhitungkan dengan presis, yang mesti dibayar oleh Dunia Ketiga kepada pusat teknologi yang hakekatnya memegang otoritas secara sentralistik.

Watak kepenguasaan inilah yang kemudian oleh Galbraith dielaborasi dalam Bab III dan XI, di mana ia dengan gamblang memberikan ulasan kritis tentang teknostruktur.

"Teknostruktur bukan hanya gugusan besar sekian proses teknologis saja, mulai dari ilham gagasan pertama sampai dengan pemasaran hasil-hasil teknologi itu, semacam wadah atau wahana pasif belaka, tetapi merupakan sesuatu yang berperangai penguasa .... (halaman xiii)

Guna lebih menuding "negara dunia" di mana kebudayaan teknologis merupakan "konstitusi", Barnet dan Muller memandang

<sup>1</sup> Lihat, Soedjatmoko, *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1983).

MNC—kapitalisme dunia taraf baru—telah memaksakan sistem sosial baru yang melawan keseimbangan sosial, ekologi, dan terutama keseimbangan psikologis masyarakat bangsa-bangsa. "Prestasi" nya telah menambak keparahan akan kelaparan, pengangguran dan ketidakadilan di negeri-negeri Selatan sebagai akibat ofensif ideologis: pertumbuhan tanpa batas. Malahan Surendra J. Patel lebih dahulu menobatkan MNC sebagai "ahli-ahli keserakahan tanpa hati nurani."

Kecuali Bab terakhir (XIII) yang ditulis oleh futurolog Marshall McLuhan, yang menyatakan bahwa dunia kini sedang memasuki zaman yang sama sekali lain paradigma-paradigmanya, bab-bab selbihnya umumnya membentangkan keterangan-keterangan menyangkut "perkosaan" komponen-komponen sistem kehidupan masyarakat oleh teknologi maju.

Mungkin dapat dipilah tulisan Toynbee dalam Bab IX, tentang psikologi perjumpaan kebudayaan-kebudayaan. Di dalamnya teras *implisit arogansi* tertentu dalam penonjolan superioritas Barat. Disodorkannya kenyataan, bahwa setiap pola budaya (teknologi inklusif di dalamnya) merupakan suatu keutuhan organis dengan bagian-bagian yang kesemuanya saling tergantung. Dengan itu Toynbee hendak menyatakan betapa mustahilnya memakai teknologi (Barat) dalam fungsinya yang betul, tanpa menerima kaidah-kaidah yang inheren terdapat di dalamnya. Lihatlah keangkuhannya, dalam pernyataan berikut :

"Sangatlah besar kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh suatu gagasan, tatanan atau susunan suatu teknik, jika itu dilepaskan dari lingkungan asalnya dan memancar ke luar dalam lingkungan masyarakat yang kemudian bentrok dengan pola historis kehidupan masyarakat setempat." (hal. 84).

Apabila dalil Toynbee diterima tanpa *reserve*, ke 12 bab yang lain dalam bunga rampai ini agaknya kurang berguna. Secara diametral pendirian Toynbee ditentang oleh Koentjaraningrat dengan ucapan populernya bahwa, modernisasi bukan berarti westernisasi. Dan penyunting buku ini, Mangunwijaya—mungkin secara harfiah dan hitam putih—berkata, tanda-tanda nonwesternisasi dalam sejarah perkembangan bangsa kita dan

negeri berkembang lainnya, "nada-nadanya sulit dicari."

Memang dalam 26 halaman pengantarnya, Mangunwijaya yang sasterawan dan budayawan itu menjelaskan, bahwa buku ini *pertama*, ingin membicarakan masalah yang terkait dalam masalah dan proses *transfer* teknologi terutama segi dampak kebudayaannya; *ke dua*, mengajak pembaca untuk merenungkan hakekat teknologi itu sendiri.

Buku ini rasanya lebih berhasil dalam tujuan yang pertama dengan kesan umum dari berbagai tulisan yang ada, bahwa ketidaksederhanaan teknologi terpusat pada pola-pola internal dan lebih-lebih eksternal yang dibawanya. Beberapa di antaranya secara kritis memberikan analisa tentang kerugian tertentu dari kehadiran teknologi maju ke dalam masyarakat negeri yang belum maju. Tulisan mana telah secara sadar menunjuk perilaku teknologis yang menjadi sumber kemerosotan nilai kultural yang umumnya tradisional. Ide-ide vital yang telah diterima dengan mulus sekian generasi ke belakang, dengan "enak"-nya tergusur oleh keberingasan ofensif teknologis.

Walaupun kecaman demi kecaman tersebut dapat diterima sepenuh-penuhnya, apalagi jika pertimbangan kultural etik adalah satu-satunya kekuatan pengimbu, buku ini pasti lebih diperkaya seandainya membawa serta tulisan lain yang daripadanya diungkapkan segi-segi positif teknologi maju. Taruhlah sedikit contoh tentang teknologi kedokteran, teknologi pertanian dan komunikasi yang telah membuktikan kesanggupannya memecahkan masalah-masalah universal.

Pendekatan kebudayaan yang mewarnai buku ini tepat adanya. Pendekatan kebudayaan mungkin merupakan alternatif terbaik bagi pembangunan sesuatu masyarakat, terutama masyarakat sedang berkembang yang masih dalam proses pembentukan watak dan kepribadiannya.<sup>2</sup> Kebudayaan sebagai proses humanisasi memang seharusnya menjadi kerangka, dimana seluruh aktivitas manusia terletak, tak terkecuali kegiatan dan kreatifitas manusia yang masuk dalam lingkup ilmu dan teknologi. Lebih-lebih pada teknologi yang seringkali membuat pertimbangan dari segi

2 Alfian, *Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1980).

*feasibility* yang dapat mengurbankan martabat manusia.<sup>3</sup>

Kehadiran teknologi yang serupa ideologi itu bukan untuk dikutuk dan ditolak semata-mata, akan tetapi tentulah buat semakin memudahkan hidup manusia dalam alam keduanya, yakni dunia kebudayaannya sendiri. Maka "ideologi" baru itu perlu terus

3 Dr. Franz Magnis Suseno & Dr. S. Rekso-susilo CM, *Etika Jawa Dalam Tantangan*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1983).

menerus dipahami. Dalam upaya pemahaman inilah tujuan ke dua buku ini memperoleh tempatnya, sudah jelas untuk itu diperlukan refleksi filsafat sebagai "cara terakhir" buat keluar dari kemelut dan krisis kebudayaan manusia di penghujung abad ke-XX ini.

SLAMET SUTRISNO \*

\* Penulis tinjauan ini adalah pengajar Filsafat Kebudayaan pada Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.





# Kritik dan Komentar

## Haruskah Konsepsi Rostow Mengurbankan Kultural ?

Dengan mengamati dan meneliti secara seksama tulisan Mulya Lubis berjudul "Hak-hak Kultural dalam Proses Pertumbuhan Bangsa" pada *Prisma* No. 10, Oktober 1983 saya menangkap dan menyimpulkan suatu nilai kebenaran yaitu, kita mengambil konsepsi pembangunan dari teori Rostow. Sangat disesalkan, Mulya Lubis memaparkan konsepsi Rostow hanya sekilas pintas, sebab jika teori Rostow ditelusuri tidaklah sederhana yang dikemukakan Mulya. Teori Rostow mempunyai multidimensi persyaratan untuk diterapkan pada saat ini di negeri kita, yang nota bene masyarakatnya masih mencirikan kegotong-royongan. Sedang di negeri orang berkulit putih, ciri kegotong-royongan sudah tidak kita jumpai. Yang ada hanya individualisme.

Teori Rostow lahir sekitar tahun 1956 dengan nama *The Stages of Economic Growth*, berarti ketika teori Rostow lahir, negara-negara Barat sudah memasuki usia ratusan tahun. Negeri kita yang baru berusia 38 tahun sudah memakai konsepsi Rostow, apakah konsepsi itu sesuai dengan iklim negeri yang masih muda? Mampukah kacamata Rostow menilik Indonesia yang terdiri dari 13.000 pulau dan memiliki aneka ragam suku dan memberikan panduan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah?

Rostow sendiri sebagai pencipta teori mengaku dengan jujur bahwa Pembangunan merupakan suatu proses yang akan menciptakan perombakan dalam kehidupan ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Berarti apa yang tertuang dalam GBHN (Tap MPR No. 11/MPR/1983) memproyeksikan pembangunan ekonomi sebagai titik sentral dengan menganak-tirikan politik dan sosial

masyarakat yang masih memiliki keorisinalan kultural.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa antara kacamata Rostow dengan konsepsi pembangunan yang sedang dilaksanakan ada sedikit ketimpangan. Rostow menginginkan perombakan ekonomi politik dan sosial masyarakat harus beriring sejalan, atau pada *moment* yang sama. Ternyata apa yang tertuang dalam GBHN (Tap MPR No. 11/MPR/1983) didominasi oleh pembangunan ekonomi, sedang politik dan sosial masyarakat hanya sebagai pelengkap. Seandainya konsepsi yang diimport itu berhasil mencapai tujuannya dengan titik sentral pada dimensi ekonomi, apakah iklim politik dan sosial masyarakat masih bersedia dan sesuai untuk menerima keluaran (*out-put*) pembangunan ekonomi?

Menjawab pertanyaan ini masih sulit untuk menangkap kesimpulan dari apa yang diproyeksikan corak proses pembangunan negeri kita. Secara jujur harus kita akui bahwa masih terdapat suatu kekaburan model perekonomian. Konsepsi Rostow diciptakan di negeri yang beriklim kapitalis dan dipakai di negeri kapitalis. Jadi terdapat sinkronisasi. Apakah iklim perekonomian kita sesuai memakai konsepsi yang lahir dan berkembang dari negeri kapitalis?

Kacamata Rostow sendiri belum mampu menyatakan apakah konsepsinya mengandung kecenderungan optimis jika dipakai para penguasa sekarang. Tetapi melihat gelagat konsepsi pembangunan negeri kita ada kecenderungan bahwa model perekonomian kapitalis mulai memegang peranan, namun masih berbentuk kapitalisme terselubung alias konsep kapitalisme yang belum membekak.

Kita lantas perlu bertanya benarkah konsepsi pembangunan yang kita laksanakan sekarang konsep pembangunan Barat yang diambil secara utuh dari teori Rostow?

Pertanyaan ini sudah kita jawab pada alinea di atas.

Dalam teori Rostow pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap yaitu: 1. Masyarakat tradisional (*the traditional society*); 2. Prasyarat untuk lepas landas (*the preconditions for take-off*); 3. Lepas landas (*take-off*); 4. Gerakan ke arah kedewasaan (*the drive to maturity*); 5. Masa konsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*).

Salah satu ciri "gerakan ke arah kedewasaan" yang bukan bersifat ekonomis dikatakan: masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dengan keajaiban yang diciptakan industrialisasi dan kritik-kritik kepada industrialisasi mulai timbul.

Kita sekarang sedang membenahi diri dengan aneka ragam pembangunan menuju industrialisasi dan berada di ambang posisi tahap lepas landas. Berarti satu tahap lagi kita akan memasuki tahap "gerakan ke arah kedewasaan." Sampai di tahap ini sudahkah kita mampu dan bersedia menerima kenyataan dengan lapang dada melihat salah satu ciri tahap "gerakan ke arah kedewasaan" seperti di atas? Bagaimana sikap dan tindakan kita jika pembangunan industrialisasi sudah selesai (berjalan) ternyata

kita akan memasuki "gerakan ke arah kedewasaan?" Apakah elemen-elemen industri hanya kita fungsikan selama satu tahap yaitu hanya pada tahap "lepas landas" sedang pada tahap "gerakan ke arah kedewasaan" kita harus membese-tuakan elemen-elemen industri tersebut? Rostow tidak memberi suatu pernyataan yang tegas dalam materinya, sampai berapa tahun perbedaan antara satu tahap dengan tahap lainnya. Rostow tidak memberi keterangan angka yang kongkrit.

Tulisan ini bukan bermaksud mengecam konsepsi Rostow, melainkan memproyeksikan sebagian dari konsepsi Rostow sebagai bahan pelengkap tulisan Mulya Lubis yang dimuat pada *Prisma* 10, Oktober 1983. Buat Mulya Lubis, sebagai akhir kata dari tulisan ini saya titipkan; pada umumnya perencanaan pembangunan dilakukan ahli-ahli ekonomi, tetapi pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh aparat-aparat pemerintah, pengusaha swasta maupun individu-individu dalam masyarakat.

EDDIE POLO TAMPUBOLON

Mahasiswa F.E, Universitas Nomenen

Jl. Sutomo 4A

Medan.

\*\*\*

## Pors Politik Etnis Cina

T. Mulya Lubis dalam tulisannya "Hak-hak Kultural dalam Proses Pertumbuhan Bangsa" (*Prisma* no. 10, Juli 1983) mengemukakan, bahwa beberapa kelompok minoritas merasa ada perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial politik. Saya tidak meragukan pernyataan tersebut, tetapi apakah benar kelompok etnis Cina lebih banyak memusatkan perhatiannya di bidang ekonomi karena perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial politik seperti yang tertulis dalam catatan kaki no. 21.

Bila kita perhatikan, memang keadaan ekonomi kelompok etnis Cina pada umumnya dapat dikatakan kuat, kalau tidak dikatakan menguasai jalur lalu lintas perekonomian Indonesia. Dalam konteks ini ada asumsi bahwa elite politik cenderung menjadi elite

ekonomi; demikian pula sebaliknya, elite ekonomi cenderung menjadi elite politik. Dalam hal ini bisa jadi etnis Cina—sebagai elite ekonomi—tidak mempunyai *political curiosity* dan terjun di dalamnya. Atau mungkin ada sebab lain mengapa etnis Cina tidak menjadi elite politik; bukan karena semata-mata hak politiknya dikebiri. Misalnya dilihat dari latar belakang historis seperti yang dikemukakan Ismid Hadad dalam *Prisma* no. 7, Juli 1983, bahwa sejak zaman Portugis dan zaman kolonialis Belanda, struktur perekonomian Indonesia dikuasai modal dan kekuatan asing, di mana bidang perdagangan dan distribusi penguasa kolonialis Belanda diserahkan kepada pengusaha etnis Cina.

Latar belakang historis inilah yang lebih relevan—walaupun menurut pengakuan mereka terjadi perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial politik—hingga secara tu-

run-temurun hanya menekuni bidang perekonomian dengan berbagai fasilitas baik sejak penguasa kolonialis Belanda maupun pada masa sekarang—sehingga mereka terlanjur merasa *confort* dalam jalur perekonomian (dalam hal ini perdagangan) yang pada akhirnya tidak mau mengambil resiko

*vivere veri coloso* seperti halnya dalam jalur politik. Mana yang lebih persuasif?

HERMAN W. SUTISNA  
Mhs. Fakultas Hukum  
Univ. Ibn Khaldun  
Bogor.

\*\*\*

## Siapakah yang Ditokohkan ?

Saya sebagai pembaca majalah *Prisma* ingin mendapatkan penjelasan seperlunya tentang rubrik "Tokoh" karena ada keinginan mencoba mengisi rubrik ini. Untuk itu saya minta dijelaskan mengenai; 1. Kriteria tokoh yang dapat ditampilkan, 2. Penekanan tulisan, 3. Prioritas jenis tokoh yang mungkin ditampilkan.

Atas perhatian Saudara saya ucapkan banyak terima kasih.

BAMBANG WIDIATMOKO  
Fak. Sastra UNPAD  
Jl. Dipati Ukur No. 35  
Bandung.

## Jawaban Redaksi

1. Tokoh yang ditampilkan adalah yang sudah meninggal, karena peranan mereka dalam bidangnya dianggap sudah selesai.

2. Bukan sekedar tulisan kenang-kenangan atau *in memoriam*, tetapi sebagai sebuah studi mendalam tentang peranannya di dalam bidang masing-masing.

3. Tidak terkecuali. Segala bidang, asalkan peran Tokoh ini punya "gaung" nasional ataupun internasional. Bisa saja dalam bidang sastra, ekonomi, sosial, musik, ataupun politik dan sebagainya. Misalnya, tokoh Agama, bukan hanya sekedar dalam dakwah, tetapi juga punya wawasan nasional.

(Redaksi).



## Para Penulis

FARCHAN BULKIN, lahir di Pekalongan tanggal 15 Agustus 1947, adalah dosen FISIP UI, Jakarta. Tamat dari FIS Universitas Indonesia (1975), melanjutkan studi di bidang Ilmu Politik ke Universitas Washington, Amerika Serikat, sehingga meraih gelar M.A. (1978) dan Ph.D. (1983) dengan disertasi berjudul *State and Society: Indonesian Politics under the New Order 1966-1978*.

JOHN S. NIMPOENO, lahir di Bandung tanggal 2 April 1926, adalah Dekan Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran, Bandung. Pernah menjadi perwira TNI-AD (1945-1981) dan memegang berbagai jabatan pimpinan di lingkungan perguruan tinggi (1960-kini). Tamat dari *Albert-Ludwig Universität*, Freiburg i.B.R, Jerman Barat (1959) jurusan Psikologi, kemudian memperdalam psikoterapi pada *Universität's Klinik Albert-Ludwig Universität*, Jerman Barat (lulus tahun 1965). Gelar Doktor Psikologi diperolehnya dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1981) dengan disertasi berjudul *Keperantaraan dalam Konteks Budaya Indonesia*. Aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah di dalam dan luar negeri, menulis berbagai karangan ilmiah dan semi populer serta menyunting beberapa penerbitan fakultas. Aktivitasnya di bidang penelitian diarahkan terutama pada masalah-masalah Psikologi Klinik dan Psikologi Budaya.

J.A.C. MACKIE, adalah Kepala pada Department of Political and Social Change pada Australian National University, Canberra, Australia. Sejak tahun 1960-an memusatkan perhatian pada studi tentang Indonesia, dan pernah menjadi Direktur Penelitian pada Centre of Southeast Asian Studies, Monash

University, Melbourne. Di antara karya-karyanya tentang Indonesia antara lain *Konfrontasi, The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966*, (Kualalumpur: Oxford University Press, 1974), *The Chinese in Indonesia*, (Thomas Nelson Ltd. & The AIIA, 1976), "Inflation and Conflict in Indonesia", dalam *Australian Outlook*, Vol. XVIII, no.3, Desember 1964; dan "Problems of Inflation in Indonesia", (Cornell Modern Indonesia Project, Monograph Series, 1967).

LOEKMAN SOETRISNO, lahir di Blora tanggal 15 Mei 1937, adalah dosen Fak. Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan staf senior pada Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, serta pernah menjadi Sekretarisnya (1971-1973). Setelah tamat dari Fak. Sastra dan Kebudayaan UGM, melanjutkan studi ke Negeri Belanda dan meraih gelar *Master of Social Science (MSS)* dalam Rural Development dari *Institute of Social Studies*, Den Haag, 1976. Gelar Ph.D. dalam Rural Sociology diperolehnya dari *Cornell University*, Ithaca, A.S. Aktif dalam berbagai seminar dan penelitian, serta banyak menulis artikel ke berbagai majalah kampus dan majalah ilmiah lainnya.

SUDJOKO, lahir di Bandung tahun 1928, adalah dosen Seni Rupa *Institut Teknologi Bandung*, staf ahli majalah *Kampus* dan pembantu majalah *Tempo*. Setelah tamat dari Universitas Indonesia (1954), melanjutkan studi dan memperoleh gelar M.A. pada *Universitas Chicago* dengan spesialisasi Pendidikan Seni Rupa (1971). Aktif menulis dan mengikuti berbagai diskusi dan seminar di bidang seni dan budaya.